

## BAB II

### DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

#### A. Lokasi Tempat Khusus Parkir yang Berpotensi di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan

##### 1. Gambar 2.1: Potensi lokasi parkir di Rumah Sakit Ratu Zaleha (BLUD)



Lokasi parkir roda 2 (dua), di rumah sakit ratu zaleha.



Lokasi parkir roda 4 (empat), di rumah sakit ratu zaleha.

**2. Gambar 2.2: Potensi lokasi parkir di PD.Pasar Bauntung Batuah**



Lokasi parkir roda 4 (empat), di PD.pasar bauntung batuah



Lokasi parkir roda 2 (dua), di PD.pasar bauntung batuah

**3. Gambar 2.3: Potensi lokasi parkir di Stadion Demang Lehman**



Lokasi parkir roda 2 (dua), di Stadion Demang Lehman



Lokasi parkir roda 4 (empat), di Stadion Demang Lehman

**4. Gambar 2.4: Potensi lokasi parkir Kelampaian (ziarah Religius)**



Lokasi parkir roda 4 (empat), di Kelampaian (ziarah religius)



Lokasi parkir roda 2 (dua), di Kelampaian (ziarah religius)

**5. Gambar 2.5: Potensi lokasi parkir Alun-Alun Martapura (berpotensi besar saat ada event pameran)**



Lokasi parkir roda 4 (empat), di Alun-alun Martapura



Lokasi parkir roda 2 (dua), di Alun-alun Martapura

**6. Gambar 2.6: Potensi lokasi parkir di Giant Ekstra**



Lokasi parkir roda 2 (dua) dan roda 4 (empat), di Giant Ekstra

**7. Gambar 2.7: Potensi lokasi parkir di Water Boom Pesona Modren**

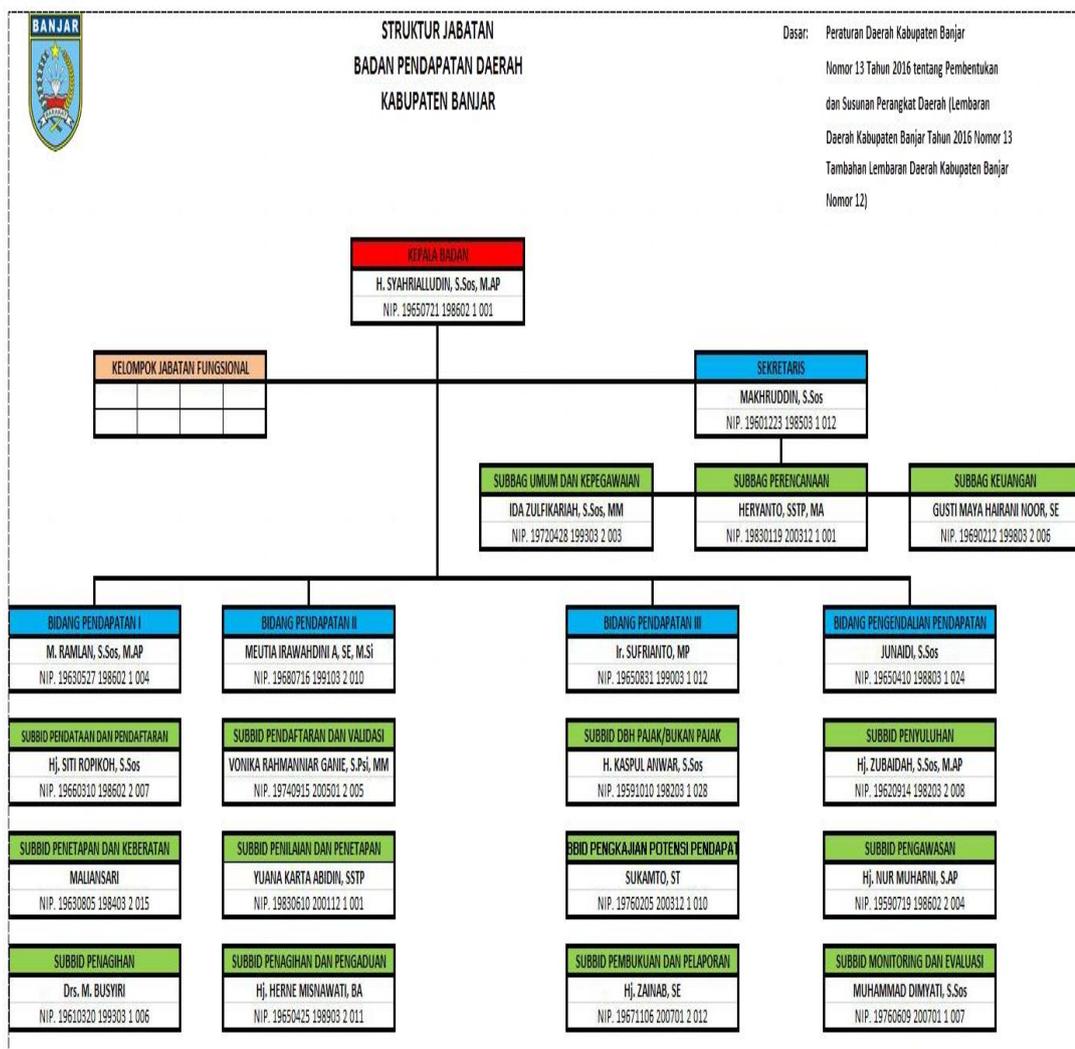


Lokasi parkir roda 2 (dua), di Water Boom Pesona Modren

## B. Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar

### 1. Struktur Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar

Dari hasil data yang di dapat oleh peneliti bahwa data struktur Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 11 mei 2017 peneliti telah menerima data struktur Dinas Pendapatan Daerah telah berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah, dan dari hasil data wawancara oleh peneliti Dinas Pendapatan Daerah berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah pada tanggal 29 Desember 2016.



## **2. Visi Misi Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar**

Visi:

**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar yang Sejahtera dan Barokah**

Penejelasan Visi:

- Sejahtera adalah kesejahteraan rakyat yang mengandung keterpaduan dimensi material dan spiritual dalam wujud suasana kehidupan yang aman dan damai.
- Barokah adalah sesuatu yang dirasakan mempunyai nilai tambah, memberi manfaat dan kemaslahatan bagi orang banyak.

Misi :

1. Meningkatkan pengalaman ajaran agama dan suasana kehidupan beragama.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan sosial.
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan Agribisnis dan Industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan.
4. Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Amanah.

Pokok-pokok Misi :

- a. Agama : pengamalan dan suasana keagamaan.
- b. SDM : pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, pelayanan sosial.
- c. Pertumbuhan ekonomi, pendapatan : pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam pertanian umum, agribisnis, argoindustri, daya saing komoditas unggulan daerah, kelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan.
- d. Pemeratan dan keseimbangan : ekonomi dan pembangunan antara wilayah
- e. Pelayanan : pelayanan pemerintah dan pelayanan publik.

Penjelasan Misi :

- a. Misi kesatu :

Mewujudkan kondisi masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai ajaran agama berbasis keilmuan sehingga terjaga nuansa keindahan kehidupan beragama, ketertiban di lingkungan masyarakat, terpelihara kerukunan dan toleransi antar umat beragama serta kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

- b. Mis kedua :

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan indikasi adanya peningkatan mutu pendidikan terhadap siswa sekolah umum dan agama, meningkatkan minat baca masyarakat, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, kualitas ketenagakerjaan serta perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

c. Misi ketiga :

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan indikasi adanya pertumbuhan ekonomi khususnya PDRB sektor pertanian umum, sektor perikanan, mantapnya ketahanan pangan daerah yang disertai peningkatan pendapatan, produksi dan produktifitas, peningkatan nilai tambah, daya saing produk unggulan daerah, pengembangan industri hilir, agroindustri, kebijakan (regulasi) yang tepat dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam yang berkelanjutan serta prinsip tata kelola lingkungan yang baik.

d. Misi keempat :

Mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang berkeadilan dan menyelenggarakan pembangunan pada segala aspek dan sendi kehidupan yang hasilnya dapat dirasakan secara merata, seimbang dan proporsional oleh seluruh lapisan masyarakat dan antara wilayah dengan mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh. Keberpihakan kepada masyarakat dan wilayah yang tertinggal, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama terhadap pelayanan sosial dan sarana prasarana ekonomi serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek.

e. Misi kelima :

Meningkatkan penyelenggaraan administrasi pemerintah yang efisien, efektif dan akuntabel pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi publik, kondisi keamanan dan politik yang kondisi

serta pelayanan publik yang berorientasi ada pelayanan prima secara terpadu.

### **3. Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar**

Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah sesuai asas otonomi dan tugas di bidang pendapatan yang meliputi pengelolaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan penerimaan Dana Perimbangan serta Pembukuan atau Pelaporan. Sedangkan fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar sesuai pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
2. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian bidang penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
3. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian bidang penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
4. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian bidang penerimaan Dana Perimbangan.
5. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian bidang pembukuan atau pelaporan.
6. Pemberian pelayanan umum bidang pendapatan.
7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

8. Pembinaan, terhadap Unit Pelaksana Teknis. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional.

**4. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar**

SK KEPALA DINAS PENDAPATAN NOMOR 153 TAHUN 2016  
DASAR: PER/20/M.PAN/II/2008.

Persentase capaian Pendapatan Daerah.

Pajak Daerah Kabupaten Banjar (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011)

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Retribusi Jasa Umum (Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011)

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pelayanan Kebersihan
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Sipil

4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
7. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
8. Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus
9. Retribusi Pelayanan Tera Ulang
10. Retribusi Pelayanan Pendidikan
11. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Retribusi Jasa Usaha (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011)

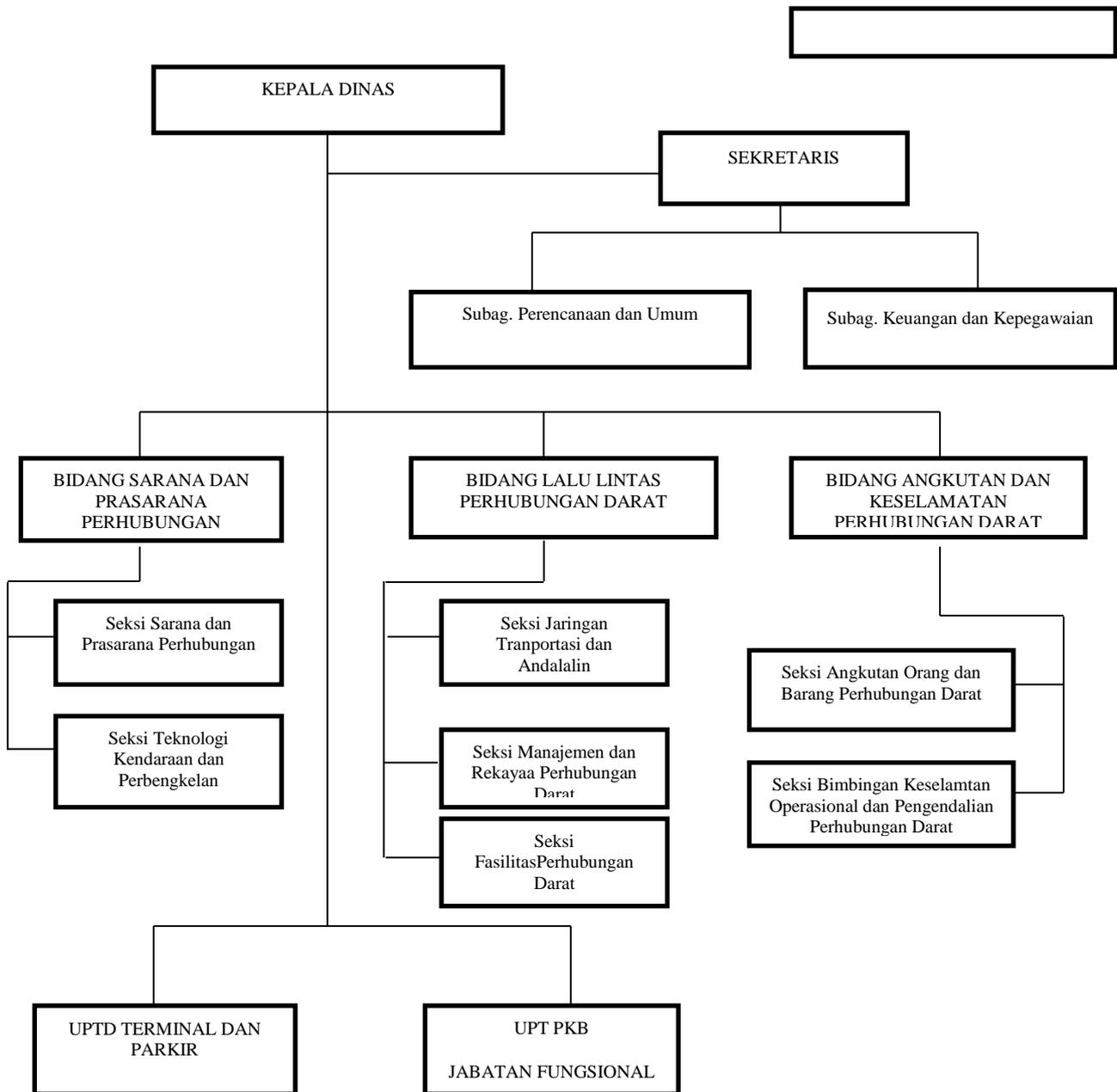
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Retribusi Terminal
3. Retribusi Tempat Khusus Parkir
4. Retribusi Tempat Penginapan atau Pesanggarahan atau Villa
5. Retribusi Rumah Potong Hewan
6. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
7. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
8. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah

Retribusi Perijinan Tertentu ( Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011)

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Izin Gangguan
3. Retribusi Izin Trayek
4. Retribusi Izin Usaha Perikanan

## C. Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar

### 1. Struktur Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar



Dari hasil data diatas yang di dapat oleh peneliti bahwa data struktur Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 03 mei 2017 peneliti telah menerima data struktur yang awalnya

Dinas Perhubungan dan Informatika yang telah berubah menjadi Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar, dan dari hasil data wawancara oleh peneliti Dinas Perhubungan dan Informatika berubah menjadi Dinas Perhubungan pada tanggal 23 Desember 2016.

## **2. Visi Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar**

Visi :

Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah.

Misi :

1. Mewujudkan Keselamatan dan Keamanan Transportasi yang Tertib, Aman, Nyaman, dan Berwawasan Lingkungan
2. Mewujudkan Kinerja Pelayanan Sektor Transportasi yang Handal

## **3. Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar**

Dinas Perhubungan mempunyai tugas:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang Perhubungan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksana kegiatan bidang sarana dan prasarana perhubungan.
- c. Merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan operasional, membina, mengawasi dan mengadalkan serta mengkoordinasikan pelaksana kegiatan bidang lalu lintas perhubungan darat.

- d. Merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan operasional, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang angkutan dan keselamatan perhubungan darat.
- e. Mengelola kegiatan kesekretariatan.
- f. Membina, mengawasi dan mengendalikan suatu kegiatan pada unit pelaksana teknis.
- g. Membina kelompok jabatan fungsional dan.
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

#### **4. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas:

- a. Menyusun program yang mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data.
- b. Menyusun program mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan serta laporan.
- c. Menyusun program mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan anggaran
- d. Menyusun suatu program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan.
- e. Menyusun program yang, membina, mengatur dan mengevaluasi pengelolaan urusan ketatausahaan.

- f. Menyusun program pembina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- g. Menyusun program pembina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi efektivitas organisasi dan tatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

#### **5. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun suatu rencana kegiatan penyusunan program, rencana kegiatan dan teknis umum dinas perhubungan.
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun bahan petunjuk teknis penyusunan program dan rencana kegiatan.
- c. Menghimpun, menganalisis dan menyajikan data bidang perhubungan dalam berbagai bentuk.
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama rencana strategis
- e. Menyiapkan bahan penyusunan pada program dan rencana kegiatan terintegrasi.
- f. Melaksanakan kerjasama penyusunan program dan rencana kegiatan terintegrasi.
- g. Menyiapkan bahan dan menyusun sesuai petunjuk teknis penyusunan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan.
- h. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pada anggaran belanja tidak langsung, belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan dinas perhubungan.

- i. Melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran dan rencana pendapatan dan penerimaan.
- j. Menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran.
- k. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi keuangan.
- l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran.
- m. Menyiapkan bahan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan.
- n. Menyiapkan bahan dan melakukan pengusulan pejabat pengelola perbendaharaan.
- o. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi program, rencana dan teknis umum kegiatan.
- p. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pada suatu kegiatan dinas perhubungan dan.
- q. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

#### **6. Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan**

Bidang sarana dan prasarana mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, mengatur dan mengawasi dalam terselenggaranya operasional sarana dan prasarana lalu lintas jalan dan sarana dan prasarana lalu lintas sungai dan danau.
- b. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terlaksananya pembangunan sarana prasarana lalu lintas jalan dan prasarana lalu lintas sungai danau.

- c. Merencanakan, mengatur, dan mengawasi terlaksananya pemberian bimbingan dan pelayanan perijinan perbengkelan umum, serta pengaturan alat tambahan kendaraan.
- d. Merencanakan, mengatur, dan mengawasi terselenggara operasional kendaraan bermotor baru sesuai dengan kemajuan teknologi dan kemajuan prasarana jalan dan.
- e. Memberikan suatu saran atau telaahan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
- f. Memberikan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

#### **7. Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan**

Seksi sarana dan prasarana perhubungan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan dalam perumusan kebijakan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pembangunan.
- b. Menyiapkan penyusunan suatu rencana umum atau rencana induk pembangunan dan pengembangan sarana prasarana transportasi.
- c. Menyiapkan penyusunan rencana teknis pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.
- d. Perencanaan dan perawatan sarana dan prasarana perhubungan di wilayah Kabupaten.
- e. Penertiban izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.

- f. Penetapan kawasan perkotaan untuk layanan angkutan perkotaan.
- g. Penetapan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) atau Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk pelabuhan yang memuat penumpang lokal.
- h. Penetapan rancana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) atau Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk pelabuhan sungai dan danau.
- i. Penertiban pada izin usaha dermaga selama 24 jam untuk pelabuhan penumpang lokal.
- j. Penertiban pada izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR atau DLKP dan.
- k. Penertiban izin perkerjaan pengerukan di wilayah perairan wilayah pelabuhan penumpang lokal.
- l. Penertiban izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan penumpang lokal.
- m. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dalam daerah Kabupaten.
- n. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan barang dalam daerah Kabupaten.
- o. Memberikan saran atau telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- p. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi.

- q. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

## 8. Indikator Kinerja Bidang Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar

Program dan indikator Kinerja Bidang Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel.2.1

Program dan Indikator Kinerja Bidang Dinas Perhubungan

Program	Indikator Kinerja	Satuan
<b>Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor</b>	Jumlah kendaran bermotor yang di uji	%
	Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor	%
<b>Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas</b>	Jumlah pemasangan rambu lalu lintas.	%
	Panjang pengecatan/pengadaan marka jalan.	%
	Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan ( <i>Guardrail</i> ).	%
<b>Program peningkatan pelayanan angkutan</b>	Persentase kendaraan angkutan umum yang telah memiliki trayek	%
	Tersediannya jaringan angkutan umum dan atau angkutan pelajar pada setiap kecamatan	%
	Jumlah pelanggaran rata-rata dalam setahun	Kali
	Jumlah sosialisasi	Kegiatan
	Jumlah peserta AKUT	Orang
	Jumlah dokumen / laporan	Buah
	Jumlah bengkel yang memenuhi SPM	%
<b>Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan</b>	Jumlah dermaga	Buah
	Jumlah halte	Unit
<b>Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan</b>	Persentase operasional terminal dengan kualitas baik	%
	Persentase operasional dermaga dengan kualitas baik	%
	Jumlah dokumen	Dokumen
	Jumlah kegiatan sosialisasi	Kali
	Jumlah kegiatan monitoring/ survey	Kegiatan

Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar 2017